

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Salim, dkk., 2019. *Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip dan Penerapan)* CV. Tohar Media, Makassar.
- Dr. A Djoko Sumaryanto, S.H., M.H. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hal 7
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media, Depok, 2018, hal 16
- Dr. M. Zamroni, S.H., M.H. *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2024, hal 16
- Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, S.H., M.kn. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif hukum Nasional*. Prenada media, Jakarta, 2021, hal 26.
- Extrix Mangkepriyanto. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia, 2019, hal 19
- I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH., *Buku Ajar (Bahan Ajar) Hak Menyatakan Pendapat Di Muka Umum Secara Bebas Dan Bertanggungjawab*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013
- Iman Jalaludin Rifa'I, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hal 7-8
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., L.L.M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta, 2021. hal 133
- Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal 3
- Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H. dkk. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek*, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hal 40.

Jurnal

- Anang Dony Irawan dan Umar Sholahudin, Analisis Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, vol. 4, no. 2, 2024, doi:10.37640/jcy.v4i2.2082.
- Andi Riska, dkk. Pembatasan Kebebasan Berpendapat Di Era Digital. *Jurnal Osfprenprints*, 2021 hal 12

- Aras Reka, dkk. Kritik Sosial dalam Lagu Grup Band Feast: Kajian Teori M.A.K. Halliday, *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra*, Vol. 11, No. 1, 2025, hal 473
- Bian Pamungkas, dkk. Komoditas Musik dalam Skena Musik Underground di Bandar Lampung, *Sulawesi Tenggara Educational Journal*. Vol. 5, No. 1, 2025. hal 213
- Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *Jurnal Yustitia*, Vol. 15, No. 1 Mei 2021, hal 30.
- Danu, dkk. Kritik Sosial Dalam Lirik Lagu (Analisis Wacana Lagu Maju Dari Feast). *Professional Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 1, 2024, hal 353
- Dede Fadilatunisa Dan Dwi Wahyu Candra Dewi. Kritik Sosial Dalam Lagu “Bayar Bayar Bayar” Karya Band Sukatani. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Mei 2025, hal 341
- Ersa Kusuma, dkk. Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 01, No. 03, 2023, hal 100
- Hanif Maulana Yusuf, dkk. Hak Asasi Manusia (HAM). *Advances in Sosial Humanities Research*, Vol. 1, No. 5, 2023, hal 514.
- Intan Regina Maghfirani dan Muhammad Khozin. Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Kediri Tahun 2019-2020. *TheJournalish: Social and Government*, Vol. 1, No. 4, Desember 2020, hal 172
- Katrin Valencia Fardha. Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, hal 2.
- Muhammad Roqib, dkk. Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat. *Perspektif Hukum*, Vol 20, No. 1, 2020, hal 50.
- Nabella Rezkika Putri, Haura Salsabiela El Sabrina Nazary, Mural: Jaminan Dan Batasan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, hal 124.
- Nadia Nuraini Hasni, dkk. Haatzaai Artikel: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda. *Historia Madania*. Vol. 5, No, 1, 2021, hal 16
- Nyoman Gede Antaguna dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Kertha Wicaksana*, Vol. 17, No. 2, 2023, hal 139

R. Arif Hermawan, Dkk. Analisis Hukum Terhadap Asimilasi Sebagai Hak Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Banjar). *Case Law-Journal Of Law*. Vol. 2, No. 2, 2021. Hal 124

Raditya Indriadi Aribowo dan Sudarto. Analisis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Timur. *Lex Progressium : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, Vol.1, Issue 1, 2024, hal 148

Sutan Bakti harahap dan Rahmat Hidayat. Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung). *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hal 2

Syartika Dwi Halimah Arfah, dkk. Kritik Sosial Dalam Musik (Analisis Tekstual Representasi Kritik Sosial Dalam Lirik Lagu Papua Kucinta" Karya Iksan Skuter). *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 2, No. 1, 2022. Hal 105

Winda Susanti dan Eva Nurmayani. Kritik Sosial Dan Kemanusiaan Dalam Lirik Lagu Karya Iwan Fals. *SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2020, hal 2

Peraturan Peundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

<https://law.uui.ac.id/blog/2025/06/26/lagu-bayar-bayar-bayar-kritik-sosial-atau-hate-speech-implikasi-terhadap-kebebasan-berekspresi-di-indonesia/> diakses 3 juli 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penarikan-ruu-permusikan-menuai-kritik-lt5d0cd322841ff/> diakses 6 Juli 2025

<https://trenzindonesia.com/news/draft-ruu-permusikan/> diakses 6 Juli 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kritik-pemerintah-lewat-lagu-hak-berekspresi-lt686497b14645c/> diakses 18 Juli 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kritik-pemerintah-di-medsos-bisakah-dipidana-lt643921c94a6e8/> diakses 19 Juli 2025

<https://www.berdikarionline.com/asal-usul-haataai-artikelen-yang-dihidupkan-di-kuhp/> diakses 19 Juli 2025

<https://satlantaskukar.net/dasar-hukum-pelayanan-sim/> di akses pada tanggal 27 Agustus 2025

https://www.tempo.co/politik/prosedur-syarat-dan-biaya-pembuatan-sim-baru-2025-1945255#goog_rewarded diakses pada 28 Agustus 2025

<https://visi.news/mengenal-satpas-dan-samsat-perbedaan-dan-fungsi-utamanya/>

diakses pada tanggal 28 Agustus 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tilang-manual-diberlakukan-kembali--begini-nasib-tilang-etle-lt64637d886c468/>

di akses pada Tanggal 28 Agustus 2025

<https://www.vice.com/id/article/polda-metro-jaya-larang-anggotanya-kawal-konvoi-mobil-mewah-moge-dan-pesepeda/>

diakses pada tanggal 28 Agustus 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-fisik-dan-pidana-bagi-angkot-yang-ngetem-sembarangan-lt5b2c98bc2c309/>

diakses pada tanggal 28 Agustus 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/biaya-lapor-polisi-dan-cara-pelaporannya-lt627b5953ab0d8/>

diakses pada tanggal 6 September 2025

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/16/203100265/ramai-soal-pungutan-saat-lapor-polisi-polri-tidak-ada-biaya>

diakses pada tanggal 6 September 2025

<https://ntb.kemenkum.go.id/component/content/article/sama-sama-di-bawah-kemenkumham-ini-dia-perbedaan-lapas-dan-bapas>

diakses 14 September 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wewenang-kpk--kepolisian--dan-kejaksaan-dalam-kasus-korupsi-lt4cc69e823d092/>

diakses pada tanggal 14 September 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-membayar-biaya-sogok-masuk-polisi-lt5147d307dece9/>

diakses pada tanggal 17 September 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/lirik-lagu-bayar-bayar-bayar-sukatani-dinilai-kritik-sosial-yang-dilindungi-hukum-lt67b9a6372d8de/>

diakses pada tanggal 17 september 2025